

## CIVIL SOCIETY PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

Universitas Sunan Giri Surabaya, East Java, Indonesia

**Musawir, Sholehuddin Sulaiman**

[musawir.bq@gmail.com](mailto:musawir.bq@gmail.com), [sholehuddinsulaimanunsuri@gmail.com](mailto:sholehuddinsulaimanunsuri@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research examines civil society from an educational perspective. By using qualitative methods, the results of this study state that the basic concepts of Islamic education are relevant to the interests of Muslims and relevant to the design of civil society, so the application of the basic concepts of philosophy and educational theory must pay attention to the supra-system context for the benefit of the civil society that this nation aspires to*

*Keywords: Civil Society, Education, Multicultural*

### A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani (sebagai terjemahan dari kata *civil society*). Tampaknya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan untuk menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani diprediksi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Masyarakat madani merupakan istilah yang dipakai untuk mengkonseptualisasikan sebuah masyarakat ideal yang dicita-citakan.

Anwar Ibrahim menggambarkan masyarakat madani sebagai sistem sosial yang subur yang berazaskan moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Ia juga memberikan gambaran kondisi yang bertentangan dengan masyarakat madani, yaitu adanya kemelut yang diderita oleh umat manusia seperti meluasnya keganasan, sikap melampaui batas, kemiskinan, ketidakadilan, kebejatan sosial, kejahilan, kelesuan intelektual, dan kemunduran budaya yang merupakan manifestasi masyarakat madani yang kritis. Walaupun ide-ide masyarakat madani bertolak dari konsep *civil society*, namun ide-ide itu juga terdapat dalam konsep yang disebut Gelner dengan "High Islam", budaya tinggi Islam yang juga terdapat dalam sejarah Islam Asia Tenggara di kalangan Muslim Melayu Indonesia<sup>1</sup>.

Bahwa masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka "warna", bakat dan potensi. Karena itulah, masyarakat madani di sebut

---

<sup>1</sup> Komaruddin Hidayat and A F Ahmad Gaus, "Passing Over: Melintasi Batas Agama," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (1998), p. xiv

sebagai masyarakat "multi-kuota" [*a multi quota society*]. Dalam konteks sekarang, masyarakat seideal masyarakat "madinah" telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat atau sebaik-baik masa adalah masaku" [*ahsanul qurun qarni*] - terlepas dari status sahih dan tidaknya sabda ini, ataupun siapaperiwayatnya

Diakui bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW merupakan prototype masyarakat idial. Maka, prototype masyarakat madani tersebut, pada era reformasi ini, nampaknya akan upayakan untuk diwujudkan di Indonesia atau dengan kata lain akan ditiru dalam wacana masyarakat Indonesia yang sangat pluralis.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Menggali Makna *Civil Society*

Menurut beberapa ahli, masyarakat madani memiliki beberapa pendapat, diantaranya:

Ismail SM menyatakan bahwa masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada diluar pengaruh Negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.<sup>2</sup>

Muhammad AS. Hikam berpendapat bahwa civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.<sup>3</sup>

Toha Hamim berpendapat bahwa civil society adalah gagasan masyarakat mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang produktif dari kelompok-kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, serta lembaga-lembaga yang saling berhadapan dengan Negara.<sup>4</sup>

Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara.

---

<sup>2</sup> Ismail SM and Abdullah Mukti, "Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani," in *Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

<sup>3</sup> Muhammad A S Hikam, "Telaah Tentang Kebebasan Di Indonesia Menjelang Tahun 2000," *Dalam ABRI dan Kekerasan. Yogyakarta: Interfidie* (1999).

<sup>4</sup> Toha Hamim, "Islam Dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance," in *Ismail SM Dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

Masyarakat Madani bukan berasal dari Bahasa Indonesia, meskipun demikian, istilah ini sangat banyak dikaji oleh Pemikir Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa istilah masyarakat madani sedang mendapat perhatian yang serius di kalangan ilmuwan Indonesia.

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut: (1) *Free public sphere* (ruang publik yang bebas); (2) Demokratisasi; (3) Toleransi; (4) Pluralisme; (5) Keadilan sosial (social justice); (6) Partisipasi sosial; (7) Supremasi hukum memberikan jaminan terciptanya keadilan yang diposisikan secara netral.

Sedangkan menurut pandangan Islam konsep masyarakat adalah suatu yang utuh, tak terpecah. Islam memandang bahwa individu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari jama'ah. Jama'ah tak bisa dipisahkan dari keberadaan Daulah (negara). Bagai tangan yang merupakan bagian dari tubuh. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman- Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ؕ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".<sup>5</sup>*

Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu: pertama, Masyarakat Saba' , yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman; kedua, Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian Madinah antara Rasullullah SAW beserta umat

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Utama, 2002).

Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur'an sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

## 2. Konsep Masyarakat Madani (*civil society*)

Konsep masyarakat sipil (*civil society*) lahir dari sejarah sosial barat, pertama Seorang filsuf Yunani Aristoteles (384 – 322 SM) yang memandang *civil society* sebagai system kenegaraan atau identic dengan Negara itu sendiri.

Pada masa Aristoteles *civil society* dipahami sebagai system kenegaraan dengan menggunkan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan peraturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut juga menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga Negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang di sepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan dari berbagai bentuk interaksi di antara warga Negara

Berbeda dengan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) menamakannya dengan *societies civilizes*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Istilah yang digunakan Cicero lebih menekankan pada konsep Negara kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisir, rumusan Cicero ini lebih menekankan pada konsep civility atau kewargaan di satu pihak dan urbanity yakni budaya kota di lain pihak. Kota, dalam pengertian itu, bukan hanya sekedar sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan

Menurut Nurcholish Madjid (2000:80) masyarakat madani merupakan masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Menurutnya masyarakat madani dalam semangat moderen tidak lain dari civil society, karena kata "madani" menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan. Oleh karena ide-ide dasar masyarakat madani dan substansi civil society yang berkembang di dunia Eropa sama, maka Dawam Raharjo berpendapat bahwa substansi masyarakat madani dalam dunia Islam dan civil society di dunia Barat

adalah satu”.<sup>6</sup> Teori civil society dapat dipinjam untuk menjelaskan istilah masyarakat madani yang digali dari khazanah sejarah Islam. Senada dengan hal ini Nurcholish Madjid, tidak membedakan antara masyarakat madani yang lahir dari khazanah sejarah dan peradaban Islam dengan civil society yang lahir dari sejarah Eropa atau peradaban Barat”.<sup>7</sup>

Kata madani sepintas orang mendengar asosiasinya dengan kata Madinah, memang demikian karena kata Madani berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim. Maka, “Kalangan pemikir muslim mengartikan *civil society* dengan cara memberi atribut keislaman madani (attributive dari kata al-Madani). Oleh karena itu, *civil society* dipandang dengan masyarakat madani yang pada masyarakat ideal di (kota) Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat kota Madinah merupakan proto-type masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan konsep civil society. Dalam masyarakat tersebut Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dengan begitu, kalangan pemikir Muslim menganggap masyarakat (kota) Madinah sebagai prototype masyarakat ideal produk Islam yang dapat dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society”.<sup>8</sup>

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa, bentuk masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki “kemandirian aktivitas warga masyarakatnya” yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan di bumi Indonesia, yang masyarakatnya sangat plural.

Para pemikir Islam memberikan ciri utama civil society, diantaranya yaitu: (1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu- individu dan kelompok-kelompok dalam masarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) Adanya ruangan publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan Praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Hamim, “Islam Dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance.” p. 4

kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis<sup>9</sup>.

Antonio Rosmini, menyebutkan terdapat sepuluh ciri yang menjadi karakteristik masyarakat madani, yaitu: Universalitas, supermasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan (*prevalence of force*), kebaikan dari dan untuk bersama (*the tendency to equalize the share of utility*), masyarakat madani “ditujukan untuk meraih kebajikan umum” (*the common good*), tujuan akhir memang kebajikan publik (*the public good*). Ketujuh, sebagai “perimbangan kebijakan umum”, masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada semua anggotanya meraih kebajikan itu”. Kedelapan, masyarakat madani, memerlukan “piranti eksternal” untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu adalah masyarakat eksternal. Kesembilan, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan (*seigniorial or profit*). Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat (*a beneficial power*). Kesepuluh, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogin.<sup>10</sup>

Secara umum sepuluh ciri tersebut sangat ideal, sehingga mengesankan seolah tak ada masyarakat seideal itu. Kalau ada, yaitu masyarakat muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW yang relatif memenuhi syarat tersebut.

Apabila dikaji lebih lanjut, setidaknya terdapat tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah SWT (sunnatullah), sebagaimana tertuang dalam Alquran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Masykuri Abdillah, “Islam Dan Masyarakat Madani,” *Kompas Online*; Saefur Rochmat, “Masyarakat Madani: Dialog Islam Dan Modernitas Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (2003).

<sup>10</sup> Antonio Gramsci, “Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.)” (new york: international Publishers, 1971).

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.



surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Masyarakat Madani di Indonesia

Pada masa sekarang, makna masyarakat madani lebih mengarah pada masyarakat sipil (*civil society*). Konsep *civil society* lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata "*societates civiles*" dalam filsafat politiknya. Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai Negara (*state*). Secara historis, istilah *civil society* berakar dari pemikir Montequé, J.J. Rousseau, John Locke, dan Hobbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodok gererja"<sup>13</sup>

Indonesia memiliki tradisi kuat *civil society* (masyarakat madani). Para ahli memberikan pendapat terkait strategi dalam membangun masyarakat madani di Indonesia:

Pertama, pandangan integrasi nasional politik. Pandangan ini menyatakan bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik berdemokrasi ala barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antar sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga Negara, demokrasi akan hanya dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkhis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi, dan politik.

Kedua, pandangan reformasi system politik demokratis, artinya pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak terlalu tergantung pada pembangunan ekonomi.

Ketiga, paradigm membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pembangunan ini merupakan paradigm alternative diantara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga Negara, khususnya kalangan kelas menengah. Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran politik warga Negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi di kalangan warga Negara. Secara teoritis, upaya pendidikan dan penyadaran politik kelas menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran

---

<sup>13</sup> Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ* (Bantam, 2012).

ideologis warga Negara. Pendapat ini selaras dengan Gramsci<sup>14</sup>

Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir kelas menengah yang secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian kelas menengah pada akhirnya akan melahirkan kelompok masyarakat madani yang mampu melakukan control terhadap hegemoni Negara.

Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada satu pandangan tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan Negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigm.

Masyarakat madani di Indonesia masih merupakan lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh sistem politik represif. Ciri kritisnya lebih menonjol dari pada ciri konstruktifnya. Mereka lebih banyak melakukan protes dari pada mengajukan solusi, lebih banyak menuntut dari pada memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah".<sup>15</sup>

Pada sisi lain masyarakat madani di Indonesia masih sangat bergantung terhadap Negara sehingga selalu berada pada posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata sosial bawah. Oleh karenanya, konteks pengembangan demokrasi kenyataan ini merupakan tantangan mendesak untuk memperlancar proses demokratisasi.

## 2. Implementasi masyarakat madani dalam pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspek. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Selama ini, upaya pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar, selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli. Padahal pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas. Berdasarkan uraian ini, ada dua alasan pokok mengapa konsep transformasi pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani sangat mendesak:

- (a) konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit, artinya terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani.
- (b) lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam

---

<sup>14</sup> Gramsci, "Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.)."

<sup>15</sup> SM and Mukti, "Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani." p.104

menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.

Konsep dasar teoritis pendidikan Islam, harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat madani di mana pendidikan itu akan diterapkan. Apabila terlepas dari konteks “masyarakat madani”, maka pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam pada kondisi masyarakat tersebut (masyarakat madani). Jadi, kebutuhan umat yang amat mendesak sekarang ini adalah mewujudkan dan meningkatkan kualitas manusia Muslim menuju masyarakat madani. Untuk itu umat Islam di Indonesia dipersiapkan dan harus dibebaskan dari ketidaktahuannya (*ignorance*) akan kedudukan dan peranannya dalam kehidupan “masyarakat madani” dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Islam haruslah dapat meningkatkan mutu umatnya dalam menuju “masyarakat madani”. Kalau tidak umat Islam akan ketinggalan dalam kehidupan “masyarakat madani” yaitu masyarakat ideal yang dicita-citakan bangsa ini. Maka tantangan utama yang dihadapi umat Islam sekarang adalah peningkatan mutu sumber insaninya dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam komunitas masyarakat madani dengan menguasai ilmu dan teknologi yang berkembang semakin pesat. Karena, hanya mereka yang menguasai ilmu dan teknologi modern dapat mengolah kekayaan alam yang telah diciptakan Allah untuk manusia dan diamanatkan-Nya kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk diolah bagi kesejahteraan umat manusia.

Maka masyarakat madani yang diprediski memiliki ciri; Universalitas, Supermasi, Keabadian, Pemerataan kekuatan, Kebaikan dari dan untuk bersama, Meraih kebajikan umum, Perimbangan kebijakan umum, Piranti eksternal, Bukan berinteraksi pada keuntungan, dan Kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. Atas dasar konsep ini, maka konsep filsafat dan teoritis pendidikan Islam dikembangkan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kontek lingkungan masyarakat madani tersebut, sehingga pendidikan relevan dengan kondisi dan ciri sosial kultural masyarakat tersebut. Maka, untuk mengantisipasi perubahan menuju “masyarakat madani”, pendidikan Islam harus didisain untuk menjawab perubahan tersebut. Oleh karena itu, usulan perubahan sebagai berikut:

- (a) pendidikan harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena, dalam pandangan seorang muslim, ilmu

- pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT
- (b) pendidikan menuju tercapainya sikap dan perilaku “toleransi”, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini
  - (c) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan
  - (d) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur
  - (e) pendidikan Islam harus didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat madani”<sup>16</sup>

Demikian juga untuk mewujudkan masyarakat madani salah satu tranformasi pendidikan adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Tujuan demokratisasi pendidikan ialah menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktik- praktik demokrasi”<sup>17</sup>.

Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala nasional. Bahkan akan lebih efektif kalau dimulai dari sistem pendidikan berskala lokal berupa pendidikan di dalam kelas. Dalam proses PBM di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keberadaban, hal ini merupakan inti dari proses pendidikan.

Pelaksanaan demokratisasi pendidikan di kelas harus mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan teman dan guru, kemampuan sosial-ekonomi teman dan guru, kebudayaan teman dan guru, dan sejumlah kemajemukan lainnya. Di samping itu, demokratisasi pendidikan dalam PBM juga dapat ditempuh dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekarang yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakatnya (pragmatisme), tanpa harus melupakan hari kemarin.

Sebagai contoh jika peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat petani, maka orang tua atau keluarganya cenderung menuntut hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. begitu juga bila peserta didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat nelayan, atau pedagang, atau lainnya yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Contoh-contoh tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam melakukan inovasi pendidikan yang berkonteks demokratisasi pendidikan perlu diperhatikan masalah-masalah pragmatik yakni mulai

---

<sup>16</sup> Ahmadi, H. 2000. Reformasi Sistem Pendidikan Islam dan Era Reformasi: Telaah Filsafat Pendidikan Ibid.

<sup>17</sup> Ibid. p.123

dari pemilihan materi ajar, penentuan tujuan, pemilihan metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, output lulusan, sampai kebutuhan yang diharapkan dunia kerja. Hal ini cukup beralasan karena pengajaran yang kurang menekankan pada konteks pragmatik pada gilirannya akan menyebabkan peserta didik akan terlepas dari akar budaya dan masyarakatnya.

Dalam proses pengajaran pragmatik, pendidik tidak monopoli dalam memberi dan mencari informasi. Intervensi pendidik adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim PMB yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Dalam pendidikan pragmatik yang bersifat profesional diakui bahwa kelemahan pendidikan semata-mata hanya untuk menyiapkan tenaga kerja yang sifatnya praktis. Kalau demikian halnya, pendidikan hanya akan menciptakan bangsa tukang dan bukan bangsa pemikir. Namun, pendidik tidak hanya menerapkan pendidikan pragmatik melainkan juga pendidikan yang bersifat akademik yang bertugas menciptakan pemikir-pemikir bangsa yang sifatnya teoritis. Di samping tidak hanya teoritis, melainkan harus ada tindakan nyata dari hasil pemikirannya. Oleh sebab itu, perlu ada keseimbangan antara keterampilan operasional dengan kemampuan konseptual sehingga tercipta sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan global dan sekaligus bertindak lokal.

Komunikasi dalam demokratisasi pendidikan harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah yaitu dari pendidik ke peserta (*top down*) melainkan juga ada keseimbangannya yaitu dari peserta didik dengan pendidik dan antarpeserta didik sendiri (*network*). Dengan model komunikasi top down timbul kecenderungan pendidik akan merasa capek sementara peserta didik tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk, dan lebih parah lagi peserta didik tidak mendapatkan informasi baru. Pendidik merupakan satu-satunya sumber belajar dengan otoritas yang sangat tinggi dan menganggap otak peserta didik bagaikan tong kosong yang siap diisi penuh dengan berbagai informasi darinya. Sebaliknya, dengan model komunikasi network, sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik melainkan juga pada peserta didik. Guru cenderung tidak merasa capek, peserta didik mengerti dengan belajar dari pengalamannya sendiri, aktif, senang, dan kaya dengan informasi baru.

Namun, selama ini terkesan bahwa pendidikan menganut asas

subject matter oriented yang membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. Pendidikan yang menyangkut ranah kognitif sudah dijalankan dengan perhatian yang besar. Pengelolaan pengajaran yang ada memberi kesan terlalu berorientasi pada ipteks termasuk juga keterampilan motorik terlalu berorientasi pada teknis. Dengan asas ini dapat dihasilkan lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil; tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah afektif. Padahal ranah afektif sama penting peranannya dalam membentuk perilaku peserta didik. Sekarang, dalam mendukung pelaksanaan demokratisasi pendidikan, tibalah saatnya mengubah asas subject matter oriented ke student oriented. Orientasi pendidikan yang bersifat student oriented lebih menekankan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik secara utuh baik lahir maupun batin. Dalam hal ini kecerdasan otak memang penting, tetapi kecerdasan emosional juga tidak kalah pentingnya.

Dalam suasana PBM yang demokratis terjadi egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus *top down* namun diimbangi dengan *bottom up* sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik tetapi akan terjadi tawar-menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, PBM, dan evaluasi hasil belajarnya.

Demikian juga perlunya Pendidikan yang Berakar dari Budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar sejarah baik secara kemanusiaan umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan ini diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri dan percaya pada diri sendiri untuk membangun peradaban berdasarkan budaya.

Dengan konsep pendidikan di atas akhirnya dapat dijadikan desain model pendidikan Islam untuk membangun masyarakat madani. Dalam bentuk operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian visi misi dan tujuan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.
- 2) Model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain pendidikan keagamaan, yaitu benar-benar sesuai dengan konsep-konsep Islam.
- 3) Model pendidikan agama Islam tidak hanya dilaksanakan di sekolah

formal tetapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga masyarakat sehingga pendidikan agama dapat ditanamkan dan disosialisasikan yang menjadi kebutuhan peserta didik, akhirnya pendidikan agama Islam bukan lagi berupa pengetahuan yang di hafal tetapi menjadi kebutuhan dan perilaku aktual.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil secara utuh semua kurikulum (non-agama) dari kurikulum sekolah umum, kemudian tetap mempertahankan sejumlah program pendidikan agama, sehingga banyak bahan pelajaran yang tidak dapat dicerna oleh peserta didik secara baik, sehingga produknya (hasilnya) serba setengah-tengah atau tanggung baik pada ilmu-ilmu umum maupun pada ilmu-ilmu agama. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya mulai memikirkan kembali disain program pendidikan untuk menuju masyarakat madani, dengan memperhatikan relevansinya dengan bentuk atau kondisi serta ciri masyarakat madani. Maka untuk menuju “masyarakat madani”, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi yaitu apakah mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan umum atau mengkhususkan pada disain pendidikan keagamaan yang handal dan mampu bersaing secara kompetitif, misalnya mempersiapkan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid yang berkaliber nasional dan dunia.

Sedangkan Al Qur’an telah memberikan gambaran tentang arti masyarakat ideal, antara lain:

- (1) **Ummatan wahidah.** Ungkapan ini terulang dalam al-Qur’an sebanyak sembilan kali, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah/2:213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat Allah SWT. Menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dulu hingga kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Jadi, ummatan wahidah adalah suatu ummat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah SWT. dan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan.
- (2) **Ummatan Wasathan.** Mengandung makna masyarakat ideal adalah ummatan wasathan. Istilah ini antara lain terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2:143. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah *ummatan wasathan*, yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. M. Quraish Shihab (1999:328)<sup>18</sup> mengemukakan bahwa pada mulanya kata *wasath* berarti segala

---

<sup>18</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

sesuatu yang baik sesuai dengan obyeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim.

- (3) **Khaira Ummah.** Istilah *khairu ummah* yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal hanya sekali saja di sebut dalam Al-Qur'an. Yakni dalam Q.S Ali Imran/3:10. Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang mengemban tugas menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
- (4) **Baldatun Thayyibah.** Kalimat baldatun thayyibah didalam al-Qur'an diulang hanya sekali yaitu dalam surat Saba'/34:15. Didalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. *Baldatun Thayyibatun* mengacu pada tempat bukan pada kumpulan orang.

Namun penyusun tetap memasukkan ungkapan tersebut dalam istilah masyarakat ideal dengan pertimbangan factor kebahasaan. Dalam study bahasa dikenal istilah " makna kolokasi " . Artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Sebagai contoh kalau dikatakan, kertas, lem, daftar gaji, computer, meja dan kursi maka bayangannya adalah kantor atau sekolah. Demikian halnya kalau dikatakan tanahnya subur, penduduknya makmur serta pemerintahnya adil, maka bayangannya adalah masyarakat ideal dengan kata lain masyarakat madani.

Jadi masyarakat madani itu adalah mereka yang cinta pada kebaikan (al-muslih). Al-Quran secara serius memperingatkan manusia untuk menjadi muslih. Sekaligus melarangnya menjadi al-mufsid. Masyarakat madani wajib menjadikan hidupnya sebagai marhamah dan terus menebar kerahmatan pada sesama.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani merupakan suatu wujud masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas dengan ciri universalitas, supermasi, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan, dan kesempatan sama dan merata kepada setiap warganya. Ciri masyarakat ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, konsep dasar desain pendidikan harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia menurut ajaran Islam, filsafat dan teori pendidikan Islam yang dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi tentang manusia dan lingkungannya. Atau dengan kata lain pembaharuan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam,

dan untuk lingkungan (sosial–kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani.

Konsep dasar pendidikan Islam supaya relevan dengan kepentingan umat Islam dan relevan dengan disain masyarakat madani. Maka penerapan konsep dasar filsafat dan teori pendidikan harus memperhatikan konteks supra sistem bagi kepentingan komunitas “masyarakat madani” yang dicita-citakan bangsa ini.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Masykuri. “Islam Dan Masyarakat Madani.” Kompas Online.
- Departemen Agama. Al-Quran Dan Terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Utama, 2002.
- Goleman, Daniel. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. Bantam, 2012.
- Gramsci, Antonio. “Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.).” new york: international Publishers, 1971.
- Hamim, Thoha. “Islam Dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan Tentang Prinsip Human Rights, Pluralism Dan Religious Tolerance.” In Ismail SM Dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hidayat, Komaruddin, and A F Ahmad Gaus. “Passing Over: Melintasi Batas Agama.” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (1998).
- Hikam, Muhammad A S. “Telaah Tentang Kebebasan Di Indonesia Menjelang Tahun 2000.” Dalam ABRI dan Kekerasan. Yogyakarta: Interfidie (1999).
- Rochmat, Saefur. “Masyarakat Madani: Dialog Islam Dan Modernitas Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2003).
- Shihab, M Quraish. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Mizan Pustaka, 1996.
- SM, Ismail, and Abdullah Mukti. “Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2000).
- . “Signifikansi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Madani.” In Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.